

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN DISKRIMINATIF YANG DI TERAPKAN OLEH JEPANG TERHADAP CHONGRYON**

Pada BAB ini akan membahas bentuk bentuk kebijakan diskriminatif yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang maupun tindakan represif yang dilakukan oleh Masyarakat Jepang terhadap etnis Korea yang ada di Jepang. Adapun bentuk bentuk diskriminatif yang ditujukan kepada Komunitas Korea Utara oleh Jepang adalah sebagai berikut:

#### **A. Pencabutan Subsidi Biaya sekolah**

Sebagai negara yang terdiri dari populasi majemuk, terdapat 17 sekolah internasional, 8 sekolah Brazilian, dan 2 sekolah chinese yang menerima subsidi pendidikan dari pemerintah Jepang (The ASahi Shimbun, 2017) Namun hal berbeda yang diterima oleh Sekolah Korea Utara yang mendapat pengecualian dari program subsidi pemerintah tersebut Hanya ada empat sekolah korea yang berafiliasi dengan Korea Selatan yang di beri bantuan dana pendidikan. Tidak adanya subsidi yang diberikan oleh jepang terhadap sekolah sekolah Korea utara tentu saja merupakan bentuk diskriminatif terhadap warga korea utara yang ada di Jepang.

Pemerintah Jepang tidak memasukkan sekolah Korea (chōsen gakkō) dari program bebas biaya sekolah menengah. Banyak pemerintah daerah juga telah menghentikan atau menghapus dukungan keuangan untuk sekolah-sekolah Korea karena alasan politik. Tindakan semacam itu secara diskriminatif melanggar hak atas pendidikan siswa yang menempuh pendidikan di sekolah Korea berdasarkan asal etnis mereka sebagai orang Korea. Pemerintah Jepang dan pemerintah daerah seharusnya tidak melakukan tindakan represif seperti itu.

Sekolah Korea di Jepang didirikan setelah pembebasan rakyat Korea dari penjajahan Jepang pada tahun 1945. Sekolah-sekolah didirikan untuk mendidik anak-anak Korea di Jepang yang telah dirampas nama Korea mereka,

bahasa dan budaya Jepang. Diperkirakan saat itu ada 525 sekolah Korea di seluruh Jepang dan sekitar 44.000 anak-anak Korea menghadiri sekolah-sekolah tersebut. Saat ini ada sekitar 70 sekolah dari taman kanak-kanak hingga universitas dengan sekitar 8.000 siswa (Cho Ki-Weon, 2017).

Pada bulan April 2010, pemerintah Jepang memperkenalkan Program Pengabaian Biaya Pendidikan yang akan membebaskan biaya sekolah untuk pendidikan sekolah menengah. Direncanakan untuk memasukkan tidak hanya sekolah negeri dan swasta Jepang, tetapi juga sekolah asing di Jepang yang terakreditasi sebagai 'sekolah lain-lain' di bawah Undang-Undang Pendidikan Sekolah. Ini adalah kesempatan pertama bagi semua sekolah Korea yang diakreditasi sebagai 'sekolah lain-lain' untuk diberikan subsidi oleh pemerintah pusat Jepang.

Namun, pemerintah memulai program tanpa menerapkannya ke sekolah Korea, karena penculikan warga Jepang pada 1970-an dan 1980-an oleh DPRK. Ini sama dengan menggunakan anak-anak Korea sebagai pion politik antara Tokyo dan Pyongyang. Pemerintah Abe memutuskan untuk sepenuhnya mengecualikan sekolah Korea dari program dengan mengubah ketentuan legislatif program pada bulan Februari 2013 (itagaki, 2015).

Menyusul keputusan diskriminatif seperti itu oleh pemerintah pusat Jepang, beberapa pemerintah daerah juga telah menolak subsidi atau memotong subsidi yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah Korea hingga saat itu. Subsidi telah dihentikan di beberapa prefektur seperti Tokyo, Osaka, dan Hiroshima pada Oktober 2014. Ini mewakili sekitar sepertiga dari pemerintah lokal yang telah memberikan subsidi ke sekolah-sekolah Korea. Di Osaka, gugatan perdata yang menuntut pemerintah prefektur Osaka membatalkan keputusan untuk menolak subsidi sekolah-sekolah Korea diajukan di pengadilan pada tahun 2013 oleh sekolah Korea Osaka.

Selain itu beberapa pemerintah kota seperti Yokohama dan Hiroshima juga telah mengikuti keputusan dari otoritas

prefektur dan menahan pembayaran subsidi. Akibatnya beberapa orang tua menyerah mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Korea dan mengirim mereka ke sekolah-sekolah Jepang yang diberi lebih banyak subsidi daripada sekolah Korea.

## **B. Diskriminasi Status Kewarganegaraan**

Masyarakat yang tergabung dalam komunitas Korea ini kebanyakan mengantongi kewarganegaraan Korea, hal ini disebabkan oleh Jepang adalah negara yang menganut hukum *jus sanguinis* (hukum darah) bukan negara *jus soli* (hukum matahari), yang berarti seseorang harus memiliki setidaknya satu orang tua dari kewarganegaraan Jepang untuk mengklaim kewarganegaraan. Namun tidak menutup kemungkinan warga asing yang berdiaspora ke Jepang untuk melakukan naturalisasi menjadi warga negara Jepang, tetapi meskipun persyaratan naturalisasi dipermudah untuk orang-orang Korea Zainichi, itu masih bisa menjadi proses yang kompleks dan birokratis, di mana orang biasanya harus mengubah nama-nama Korea menjadi nama-nama Jepang. Selain itu, karena Jepang tidak mengakui kewarganegaraan ganda, seorang warga negara naturalisasi yang prospektif juga harus meninggalkan kewarganegaraan Korea mereka. Di Jepang, orang Korea Zainichi memiliki status "Tetap Permanen Khusus" di mana mereka menikmati akses ke sistem kesejahteraan sosial Jepang, pensiun, dan asuransi kesehatan. Namun, mereka tidak memiliki hak untuk memilih, dan ada beberapa klausul pensiun dan kesejahteraan sosial yang tidak berlaku bagi mereka (Lawyers Association of Zainichi Koreans (LAZAK), 2014)

Mayoritas orang-orang Korea yang sudah tinggal selama beberapa decade di Jepang hingga saat ini masih berstatus sebagai warga negara asing. Mereka termasuk individu yang memegang kewarganegaraan Jepang antara 1910 (awal pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea) dan 1952 (penandatanganan Perjanjian San Francisco dan pemulihan formal kemerdekaan politik Jepang), serta

keturunan mereka. Meskipun Traktat San Francisco tidak memasukkan klausul khusus mengenai kewarganegaraan orang-orang Korea yang akan tetap tinggal di Jepang, namun pemerintah Jepang mencabut kewarganegaraan Jepang dan warga negara Korea dan Taiwan setelah perjanjian itu menjadi efektif. Tindakan pencabutan ini oleh pemerintah Jepang, yang dilaksanakan di bawah pemberitahuan resmi dari kepala Biro Urusan Sipil di Kementerian Kehakiman pada 19 April 1952, ini adalah prosedur sepihak yang mengabaikan pendapat warga dari bekas koloni Jepang. Selain itu, ukuran itu diterapkan pada kelompok kecil (sekitar 500.000) dalam populasi di Jepang pada saat itu (sekitar 85 juta), secara khusus menargetkan orang-orang dari Korea dan Taiwan atas dasar etnis atau ras. Dengan demikian, meskipun dilaksanakan sebelum pembentukan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), tindakan pencabutan oleh pemerintah Jepang pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi rasial. Selain itu, tindakan ini dilaksanakan dengan pemberitahuan resmi dari kepala Biro Urusan Sipil di Kementerian Kehakiman tanpa dasar hukum. Hal ini melanggar Pasal 10 Konstitusi Jepang, yang menyatakan "kondisi yang diperlukan untuk menjadi warga negara Jepang akan ditentukan oleh hukum." Namun, Mahkamah Agung Jepang terus menyetujui langkah pencabutan. Ketika Perjanjian San Francisco mulai berlaku, warga Korea yang tinggal di Jepang kehilangan kewarganegaraan Jepang mereka. Meskipun keadaan seperti itu, pemerintah Jepang telah membatasi hak asasi manusia Zainichi Korea. Dalam kapasitas ini, orang-orang Korea Zainichi telah mengalami deportasi seperti warga negara asing lainnya, dan pemerintah Jepang telah menambahkan persyaratan kewarganegaraan pada jaminan sosial dan ketentuan kesejahteraan dan mengecualikan orang-orang Korea Zainichi dari jabatan publik. Langkah-langkah pengecualian seperti itu yang digunakan oleh pemerintah Jepang hanya mendorong

diskriminasi berdasarkan kebangsaan dan etnis di sektor swasta.

Pada tahun 1991, pemerintah Jepang membentuk sistem residensi permanen khusus untuk individu yang lahir di bekas koloni Jepang sebelum kekalahan Jepang pada 1945 (Korea dan Taiwan) dan keturunan mereka. Namun, pemerintah Jepang mendiskriminasi penduduk permanen khusus di bidang keamanan sosial dan kantor publik atas dasar kurangnya kebangsaan Jepang mereka. Perlu dicatat bahwa tidak semua individu yang telah tinggal di Jepang sebelum tahun 1945 diberikan status tinggal permanen khusus (alasan penolakan termasuk tidak hadir secara fisik di Jepang setiap saat antara 1945 dan 1952); beberapa tinggal di Jepang dengan status tinggal permanen permanen atau kualifikasi tempat tinggal lainnya.

Di Jepang, kewarganegaraan didefinisikan oleh Undang-Undang Kebangsaan. Undang-Undang Kebangsaan Jepang secara ketat menerapkan jus sanguinis (hak atas darah), dan, sebagai suatu peraturan, anak-anak yang lahir di Jepang tidak menerima kewarganegaraan Jepang jika orang tua mereka adalah warga negara asing. Demikian pula, keturunan orang-orang Korea Zainichi yang telah kehilangan kewarganegaraan Jepang mereka pada tahun 1952 karena alasan etnis atau ras tidak menerima kewarganegaraan Jepang kecuali salah satu orangtua mereka menikah dengan seorang warga negara Jepang. Prinsip jus sanguinis dalam hukum kebangsaan Jepang berfungsi untuk mengecualikan orang-orang Korea Zainichi dari kewarganegaraan Jepang atas dasar etnis dan ras. Dalam pengertian ini, hukum kebangsaan Jepang dapat digambarkan sebagai etnosentris atau rasis.

Di bawah undang-undang kewarganegaraan semacam itu, ada kasus-kasus generasi keempat atau kelima Zainichi Korea yang tetap menjadi warga negara asing. Di antara orang-orang Korea Zainichi yang telah kehilangan kewarganegaraan Jepang mereka pada tahun 1952, ada keluarga dengan sejarah lebih dari seratus tahun tinggal di Jepang.

Sementara hukum kebangsaan Jepang menyediakan untuk naturalisasi, proses naturalisasi juga telah diatur secara etnosentris dan rasis. Sampai saat ini, pemerintah Jepang memiliki otoritas yang tidak dibatasi dan luas atas proses naturalisasi, yang memerlukan asimilasi etnis dan budaya ke dalam populasi Jepang yang lebih besar; mengadopsi nama-nama gaya Jepang hanya salah satu contoh tersebut. Dalam masyarakat Jepang, ada kecenderungan kuat untuk menganggap naturalisasi sebagai asimilasi etnis dan budaya ke dalam populasi Jepang yang lebih besar, di samping akuisisi legal kebangsaan. Juga, tidak ada ketentuan khusus di Jepang untuk meringankan persyaratan naturalisasi bagi bekas subjek kolonial yang ada di bekas kekuasaan kekaisaran lainnya

### **C. Diskriminasi Skema Pensiun Nasional**

Orang-orang Korea Zainichi berusia lebih dari 60 pada 1 April 1986 dan Zainichi Korea yang berusia di atas 20 tahun dengan cacat sejak 1 Januari 1982 tidak dapat mendaftar di skema pensiun nasional, secara efektif mengecualikan mereka dari Pensiun Tua (Rōrei Fukushi Nenkin) dan program Basic Disability Pension (Shōgai Kiso Nenkin). Pengecualian orang Korea Zainichi dari skema pensiun nasional ini melanggar Pasal 5 (e) (iv) dari ICERD. Pemerintah Jepang memiliki kewajiban untuk merevisi peraturan terkait tanpa penundaan dan memperbaiki situasi, agar masyarakat tersebut dapat menerima manfaat pensiun.

Tahun 2009, the UN Human Rights Committee (Komite Hak Asasi Manusia) menyatakan keprihatinan berupa hasil non-retroaktif penghapusan persyaratan kebangsaan dari Undang-Undang Pensiun Nasional pada tahun 1982 dikombinasikan dengan persyaratan bahwa seseorang membayar kontribusi kepada skema pensiun untuk setidaknya 25 tahun antara usia 20 dan 60, sejumlah besar non-warga negara, terutama Korea yang kehilangan kewarganegaraan Jepang pada tahun 1952, secara efektif dikeluarkan dari kelayakan untuk manfaat pensiun di bawah skema pensiun nasional. Ini juga mencatat dengan kekhawatiran bahwa hal

yang sama berlaku untuk non-warga negara yang cacat yang lahir sebelum tahun 1962 karena ketentuan bahwa non-warga negara yang lebih tua dari 20 tahun pada saat ketika klausul kewarganegaraan dicabut dari UU Pensiun Nasional tidak memenuhi syarat, lalu tunjangan pensiun cacat (pasal 2 (1) dan pasal 26). Komite Hak Asasi Manusia selanjutnya merekomendasikan pemerintah Jepang untuk “membuat pengaturan transisi bagi warga negara yang tidak terpengaruh oleh persyaratan usia yang ditetapkan dalam UU Pensiun Nasional, dengan pandangan untuk memastikan bahwa non-warga negara tidak secara diskriminatif dikeluarkan dari skema pensiun nasional.”<sup>10</sup> Dalam laporannya pada 2006 tentang kunjungan negaranya ke Jepang, Doudou Diène, Pelapor Khusus PBB tentang Bentuk Rasisme, Diskriminasi Ras, Xenophobia, dan Intoleransi Terkait, merekomendasikan bahwa pemerintah Jepang harus mengadopsi langkah-langkah perbaikan untuk Korea yang berusia lebih dari 70 tahun dan yang tidak memiliki akses ke manfaat pensiun karena eksistensi dari klausa kebangsaan ketika mereka usia kerja.

Undang-Undang Pensiun Nasional yang diberlakukan pada tahun 1959 termasuk persyaratan kebangsaan, dan warga negara asing (banyak di antaranya adalah orang-orang Korea Zainichi yang kewarganegaraan Jepang telah dicabut pada tahun 1952) tidak dapat mendaftarkan diri dalam skema pensiun nasional. Persyaratan kebangsaan dalam UU Pensiun Nasional dihapuskan pada tahun 1982 setelah ratifikasi Konvensi Pengungsi pada tahun 1981. Warga negara asing sekarang memenuhi syarat untuk tunjangan pensiun jika mereka telah membayar biaya asuransi mereka selama lebih dari dua puluh lima tahun. Dengan amandemen pada 1985, undang-undang itu juga memungkinkan warga negara asing untuk menerima tunjangan pensiun bahkan jika mereka belum membayar biaya asuransi mereka selama dua puluh lima tahun. Sementara itu, warga negara asing yang berusia di atas 60 pada tanggal 1 April 1986, dikeluarkan dari menerima tunjangan pensiun.

Selain itu, di bawah Undang-undang Pensiun Nasional tahun 1959, yang disediakan untuk Pensiun Penyandang Cacat Dasar bagi warga negara Jepang penyandang cacat, warga negara asing dikeluarkan dari menerima tunjangan pensiun. Meskipun amandemen tahun 1982 menghapuskan klausul kewarganegaraan, mereka yang telah kehilangan kualifikasi untuk menerima tunjangan sebelum 1 Januari 1982 karena klausa kebangsaan dan warga negara asing penyandang cacat di atas usia 20 pada 1 Januari 1982 dikeluarkan dari menerima Dasar Pensiun Penyandang Cacat.

Namun, menjadi jelas bahwa diskriminasi terhadap orang Korea pada dasarnya berbeda dari diskriminasi terhadap warga negara asing lainnya ketika distribusi usia mereka dibandingkan. Secara khusus, orang Korea Zainichi merupakan satu-satunya kelompok orang asing yang menua pada tingkat yang sama dengan penduduk Jepang, dan sebagian besar penduduk asing yang berusia lanjut di Jepang yang dikeluarkan dari sistem pensiun nasional adalah orang Korea Zainichi. Misalnya, di antara 30.630 penduduk asing di Jepang pada 31 Desember 2013, 25.721 di antaranya memiliki kewarganegaraan Korea. Meskipun tidak ada data pembandingan tersedia untuk penyandang disabilitas, diperkirakan bahwa mayoritas warga negara asing penyandang cacat berusia di atas 20 tahun. per 1 Januari 1982, adalah orang Korea Zainichi

Sebagai hasil dari ukuran pengecualian di atas, sekitar 20.000 lansia Zainichi Korea dan 5.000 orang Korea Zainichi dengan disabilitas dipaksa untuk hidup tanpa pensiun pada Juli 2002. Pemerintah Jepang bahkan belum melakukan penelitian mengenai jumlah dan situasi warga Korea Zainichi yang hidup tanpa pensiun. Banyak orang Korea Zainichi yang dikeluarkan dari menerima pembayaran pensiun adalah bekas subjek kolonial Jepang dan keturunan mereka, dan kewarganegaraan Jepang mereka dicabut pada tahun 1952. Perlakuan berbeda untuk orang-orang ini atas dasar kebangsaan merupakan diskriminasi rasial de facto berdasarkan asal geografis mereka dan etnis. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka lahir di Jepang, berbicara bahasa Jepang dengan lancar,



mempertahankan kehidupan ekonomi dalam masyarakat Jepang, membayar pajak kepada pemerintah nasional dan lokal, dan kehidupan memimpin tidak berbeda dari sisa penduduk Jepang, Zainichi Korea dikeluarkan dari nasional skema pensiun berdasarkan asal geografis mereka dan, menghadapi prospek yang tidak stabil setelah pensiun

Pengecualian Zainichi Korea Dari Skema Pensiun Nasional adalah Diskriminasi Rasial. Langkah yang disebutkan di atas untuk mengecualikan kelompok-kelompok tertentu warga negara asing yang berusia lanjut dan warga negara asing dengan disabilitas dari skema pensiun nasional telah secara tidak proporsional mempengaruhi orang-orang Zainichi Korea - orang-orang dengan latar belakang kolonial dulu. Ini merupakan diskriminasi rasial, yang memiliki “dampak berbeda yang tidak dapat dibenarkan atas suatu kelompok yang dibedakan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul nasional atau etnis.”

Meskipun mempertahankan sumber pendapatan untuk skema pensiun nasional dan memastikan administrasi pensiun yang tepat dapat menjadi dasar untuk membenarkan peraturan di luar warga negara asing, tidak perlu untuk sepenuhnya mengecualikan warga negara asing pada usia tertentu untuk tujuan itu. Mungkin mungkin untuk mencari langkah-langkah yang kurang ketat terhadap hak-hak warga negara asing; misalnya, penduduk asing yang memenuhi syarat untuk tinggal di Jepang untuk jangka waktu yang panjang dan orang-orang Korea Zainichi yang kehilangan kewarganegaraan Jepang bertentangan dengan keinginan mereka sebagai akibat dari pemberitahuan 1952 oleh pemerintah Jepang bisa saja dibebaskan dari peraturan-peraturan eksklusif.

Keengganan pemerintah Jepang untuk memperbaiki situasi Zainichi Korea sangat kontras dengan tindakan perbaikan yang diambil pemerintah untuk kelompok tertentu dari penduduk Jepang. Misalnya, penduduk Kepulauan Ogasawara dan Okinawa tidak dapat mendaftar dalam skema pensiun nasional ketika diperkenalkan pada tahun 1959, karena pulau-pulau itu bukan wilayah Jepang sampai mereka

kembali pada tahun 1968 dan 1972, masing-masing. Setelah reinkorporasi Kepulauan Ogasawara dan Okinawa, pemerintah Jepang menggunakan tindakan khusus untuk penduduk pulau-pulau itu; misalnya, pemerintah membayar premi pensiun yang luar biasa dari bendahara nasional.

Sejak tahun 2005 terdapat sejumlah tindakan perbaikan yang ditujukan untuk individu yang tidak atau kurang dari jumlah penuh pensiun karena tidak membayar premi pensiun: *pertama* Sistem Penyediaan Cacat Khusus ditujukan untuk individu seperti siswa dan ibu rumah tangga, yang pendaftaran dalam skema pensiun nasional adalah opsional, yang memperoleh cacat sebelum pendaftaran mereka dalam skema pensiun nasional; *kedua* diputuskan bahwa, untuk Pensiun Lanjut Usia Tua, efektif mulai tahun 2008 dan seterusnya, perbendaharaan nasional akan membayarkan premi pensiun yang luar biasa dari orang Jepang yang terlantar yang dikembalikan ke Jepang dari Tiongkok setelah skema pensiun nasional menjadi efektif, dan tindakan perbaikan dilakukan diambil untuk individu yang tidak atau kurang dari jumlah penuh pensiun karena tidak membayar premi pensiun.

Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah Jepang dapat memperkirakan kerusakan ekonomi dan psikologis yang dialami oleh orang-orang Korea berusia lanjut dan orang cacat Zainichi tanpa akses ke skema pensiun nasional, pemerintah belum merevisi ukuran legislatif yang mengecualikan Zainichi Korea.

Zainichi Lansia dan orang-orang cacat telah mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap Jepang dengan alasan bahwa diskriminasi dalam skema pensiun nasional berdasarkan kebangsaan tidak memiliki alasan yang masuk akal dan melanggar prinsip kesetaraan Pasal 14 Konstitusi Jepang, Pasal 26 ICCPR, dan klausa perlindungan yang sama yang ditemukan dalam Pasal 2 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Meskipun tuntutan hukum mencapai Mahkamah Agung

Jepang, Pengadilan telah memutuskan mendukung pemerintah dalam semua kasus.

Tak satu pun dari putusan itu mempertimbangkan keadaan di mana Zainichi Korea dikeluarkan dari skema pensiun nasional memiliki latar belakang kolonial dulu dan telah secara sepihak dirampas kebangsaan Jepang mereka pada tahun 1952, dan orang-orang Korea Zainichi ini diperlakukan sebagai warga negara asing biasa. Pengadilan lebih lanjut mencatat bahwa pengecualian kelompok-kelompok warga negara asing tertentu dari skema pensiun nasional tidak melanggar Konstitusi Jepang, ICCPR, atau ICESCR, dengan alasan bahwa legislatif memiliki keleluasaan luas untuk menentukan apakah tindakan khusus untuk asing atau tidak. warga negara diperlukan dalam proses merevisi UU Pensiun Nasional.

#### **D. Pengecualian Penduduk Korea dan Warga Negara Asing Lainnya Dari Kantor Publik.**

Di Jepang, orang asing termasuk Zainichi Korea tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan pemerintah tanpa alasan yang sah. Bahkan dalam pekerjaan publik terbuka untuk orang asing, peluang promosi mereka sebagian besar dibatasi tanpa alasan yang sah. Pembatasan ini terhadap orang asing, terutama terhadap orang Korea Zainichi merupakan diskriminasi rasial berdasarkan asal etnis Korea, dan pemerintah Jepang harus menghilangkan hambatan yang menghalangi peluang seperti itu untuk pengangkatan dan promosi sebagai pejabat pemerintah.

Dalam Observasi Penutupnya tahun 2010, Komite CERD menyatakan: “Dengan catatan bahwa mediator pengadilan keluarga tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan publik, Komite menyatakan keprihatinan atas fakta bahwa orang asing yang memenuhi syarat tidak dapat berpartisipasi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Hal ini juga mencatat bahwa tidak ada data yang diberikan mengenai partisipasi warga negara non-nasional dalam kehidupan publik (pasal 5).

Pemerintah Jepang membatasi warga negara asing dari bekerja sebagai pejabat publik terutama dalam keadaan berikut.

1. Batasan Promosi ke Posisi Manajerial

Di Jepang, banyak pemerintah daerah membatasi karyawan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan Jepang dari peluang promosi ke jabatan manajerial atau atasan. Perlakuan ini akhirnya ditegakkan sebagai konstitusional oleh pengadilan Jepang. Misalnya, pada tahun 1994, seorang perawat Korea dengan status residensi permanen khusus yang bekerja untuk rumah sakit yang dioperasikan oleh Metropolitan Tokyo ditolak kelayakan untuk pemeriksaan untuk bagian manajemen oleh Komisi Personalia Pemerintah Metropolitan Tokyo, karena dia tidak memiliki kewarganegaraan Jepang. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu tidak dimaksudkan di bawah undang-undang nasional bahwa warga negara asing dapat mengambil kantor sebagai pegawai pemerintah daerah "yang terlibat dalam melaksanakan tugas yang melibatkan latihan otoritas publik, seperti langsung menciptakan hak dan kewajiban penduduk atau mendefinisikan ruang lingkupnya, atau pengambilan keputusan atau partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penting dari badan publik lokal biasa selanjutnya disebut sebagai pegawai pemerintah daerah dengan otoritas public. Kemudian, keputusan itu melanjutkan bahwa pemerintah daerah, dengan kebijakannya sendiri, dapat membentuk "sistem penunjukan manajemen terpadu yang terdiri dari jabatan pegawai pemerintah lokal dengan otoritas publik dan pos yang diasumsikan untuk tujuan memperoleh pengalaman kerja yang diperlukan untuk promosi ke pos-pos ini, yang bertujuan untuk memastikan manajemen personel yang tepat". Menurut penalaran Mahkamah Agung, pemerintah

lokal yang mengambil tindakan untuk mengizinkan hanya karyawan Jepang yang dipromosikan ke jabatan manajerial dalam sistem penunjukan manajemen terpadu akan dianggap membedakan antara karyawan Jepang dan karyawan asing berdasarkan alasan yang masuk akal; Oleh karena itu, tindakan semacam itu bukan diskriminasi yang melanggar hukum. Pengadilan selanjutnya menyatakan bahwa alasannya juga berlaku untuk karyawan yang memiliki status penduduk tetap khusus".

Contoh lain dari perlakuan ketat terhadap pegawai pemerintah asing adalah kasus sekolah umum. Pada tahun 1991, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi mengeluarkan pemberitahuan kepada pemerintah lokal dan menjelaskan bahwa warga negara asing memenuhi syarat untuk mengikuti ujian kerja untuk menjadi staf pengajar di sekolah umum. Namun demikian, pemberitahuan tersebut tidak menggambarkan posisi karyawan asing sebagai "guru", yang berlaku untuk warga negara Jepang, tetapi lebih sebagai "dosen penuh waktu tanpa batas waktu". Teori perbedaan ini adalah "prinsip-prinsip hukum yang dipahami secara umum" mengenai pejabat pemerintah, yaitu bahwa individu membutuhkan kewarganegaraan Jepang, tentu saja, untuk diangkat ke posisi pegawai negeri sipil di mana mereka akan menggunakan otoritas publik, atau akan menjadi terlibat dalam menentukan kebijakan pemerintah lokal. Akibatnya, karena promosi ke kepala sekolah atau berbagai posisi kepemimpinan hanya dibuka untuk "guru", karyawan asing di sekolah umum tidak dapat dipromosikan ke posisi manajerial di banyak pemerintah daerah.

Situasi saat ini yang terlalu membatasi peluang promosi orang asing tidak dapat diterima sehubungan dengan hak mereka untuk memilih pekerjaan mereka.

Harus dikatakan bahwa tidak ada alasan yang masuk akal untuk mengecualikan pegawai publik asing yang setiap hari terlibat dalam jenis pekerjaan yang sama dengan talenta setara sebagai karyawan Jepang dari jabatan manajerial. Selain itu, tidak boleh dilupakan bahwa mayoritas pejabat publik asing di Jepang adalah orang Korea Zainichi, yang telah secara sewenang-wenang kehilangan kewarganegaraan Jepang mereka setelah diakuisisi di bawah pemerintahan kolonial Jepang, dan keturunan mereka. Sebagian besar dari mereka lahir di Jepang, hidup dalam budaya Jepang, berbicara bahasa Jepang yang sempurna, menjalani kehidupan sosial mereka di lingkungan yang tidak ada bedanya dengan warga Jepang. Perbedaan antara penduduk Korea ini dan warga negara Jepang mungkin secara lahiriah tampaknya didasarkan pada kebangsaan; tetapi pada kenyataannya, itu jelas merupakan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Karena alasan ini, ia melanggar Pasal 5 (c) dan 5 (e) (i) dari ICERD.

## 2. Batasan Komisaris Konsiliasi dan Komisaris Yudisial

Sistem resolusi perselisihan sipil Jepang memiliki prosedur konsiliasi untuk urusan sipil dan keluarga di samping prosedur litigasi formal. Dalam proses konsiliasi, badan konsiliasi yang terdiri dari satu hakim dan tidak kurang dari dua anggota komite konsiliasi, yang dipilih dari warga negara non-judisial, bertanggung jawab atas kasus tersebut. Badan, berdasarkan kesepakatan para pihak, berusaha untuk mencapai penyelesaian kasus menggunakan nasihat dan saran. Sebagai praktik umum, proses pengangkatan pengacara yang memenuhi syarat untuk anggota komite konsiliasi adalah sebagai berikut: pertama, masing-masing asosiasi pengacara

merekomendasikan kandidat dari antara para pengacara anggotanya atas permintaan pengadilan keluarga atau distrik, dan kemudian Mahkamah Agung menunjuk calon yang direkomendasikan sebagai anggota.

Selain itu, dalam proses yang dipercepat dan diubah di pengadilan ringkasan, pengadilan, dengan kebijakannya sendiri, dapat memiliki seorang komisaris peradilan untuk membantu upaya untuk mengatur penyelesaian atau untuk menghadiri persidangan untuk mendengar pendapatnya tentang kasus tersebut. Secara umum, pengacara ditugaskan sebagai komisaris judicial oleh pengadilan ringkasan berdasarkan rekomendasi dari asosiasi pengacara yang relevan.

Pada Maret 2003, Hyogo Bar Association merekomendasikan pengacara yang tidak memiliki kewarganegaraan Jepang ke Kobe Family Court sebagai anggota komite konsiliasi; tetapi pengadilan menolak penunjukannya. Juga, pada Maret 2003, Pengadilan Ringkasan Tokyo menolak untuk menunjuk seorang pengacara asing, yang direkomendasikan oleh Tokyo Bar Association, sebagai komisaris peradilan. Hingga 22 Juli 2014, totalnya 25 kali, 31 pengacara yang memiliki kewarganegaraan asing - semuanya Zainichi Korea - direkomendasikan untuk anggota komite konsiliasi atau komisaris peradilan oleh masing-masing asosiasi bar lokal; tapi sayangnya, nominasi itu ditolak oleh pengadilan dalam setiap kasus. Dalam pengertian ini, Mahkamah Agung menguatkan posisinya bahwa “diduga bahwa pejabat publik” yang terlibat dalam tindakan yang melibatkan pelaksanaan kekuasaan publik atau dalam keputusan tentang kebijakan kepentingan, atau yang berpartisipasi dalam kegiatan ini akan diangkat dari antara orang-orang dari Kewarganegaraan Jepang, dan kewarganegaraan

Jepang diperlukan untuk seseorang yang akan ditunjuk sebagai komisaris konsiliasi atau komisaris peradilan, karena komisaris ini termasuk dalam kategori perwira publik tersebut

Namun, peran dan tugas konsiliasi atau komisaris peradilan adalah, dengan pengetahuan atau pengalaman ahli mereka dalam kehidupan sosial, untuk mendorong konsesi bersama pihak-pihak dalam menyelesaikan perselisihan dan untuk membantu hakim. Mereka tidak pernah terlibat dalam tindakan yang melibatkan pelaksanaan kekuasaan publik. Jelas bahwa seseorang yang memiliki integritas dan pandangan terang, yang akrab dengan sistem sosial Jepang, budaya, dan pendapat umum warganya, mampu melakukan tugas-tugas ini, terlepas dari kebangsaan mereka. Pengacara Korea yang ditolak nominasi ini telah tumbuh besar di Jepang sebagai anggota masyarakat Jepang selama bertahun-tahun dan lulus ujian pengacara sama seperti pengacara Jepang lainnya. Tidak ada alasan yang sah untuk membedakan pengacara dengan kewarganegaraan Jepang dan mereka yang tidak berkenaan dengan kualifikasi untuk konsiliasi atau komisaris peradilan. Seperti yang telah kita diskusikan di atas, perlakuan restriktif terhadap Zainichi Korea karena kurangnya kebangsaan Jepang, terutama terhadap mereka yang lahir selama era kolonial Jepang, merupakan diskriminasi rasial berdasarkan asal-usul nasional atau etnis.

### 3. Pengecualian Dari Posisi Pemerintah Lainnya

Selain masalah ini, sejumlah besar pemerintah daerah mendiskualifikasi hak warga asing untuk petugas pemadam kebakaran yang terlibat dalam kegiatan pemadaman api. Namun, sesuai dengan tujuan pekerjaan mereka untuk memastikan keselamatan individu dan untuk melindungi properti dalam keadaan darurat, tidak ada alasan yang dapat



dibenarkan mengharuskan bahwa kewarganegaraan petugas pemadam kebakaran menjadi perhatian untuk kualifikasi. Beberapa posisi resmi lainnya - seperti Komisaris Hak Sipil (jinken yogo iin), Relawan Kesejahteraan yang Ditugaskan (minsei iin), dan Relawan Kesejahteraan Anak yang Ditugaskan (jido iin) - tidak terlibat dalam kegiatan apa pun yang memerlukan latihan kekuatan publik sebagai sifat dari tugas mereka. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk mengecualikan warga asing yang juga anggota komunitas lokal bersama dengan warga negara Jepang.

Maka dari uraian diatas terlihat jelas bahwa praktik pemerintah Jepang saat ini untuk mengecualikan orang-orang Korea Zainichi yang lahir selama masa kolonial Jepang dan keturunan mereka dari pekerjaan pemerintahan ini melanggar merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia

#### **E. Dukungan Penurunan Keuangan dari Pemerintah Daerah**

Sementara prefektur dan kotamadya telah lama memberikan sekolah-sekolah Korea dengan dukungan keuangan, dukungan mereka mulai berkurang atau diakhiri setelah program sekolah tanpa iuran SMA dikeluarkan dari sekolah-sekolah Korea. Secara khusus, penghentian dukungan keuangan oleh Prefektur Osaka dan kota Osaka pada tahun 2011 memicu gerakan nasional untuk penghentian dan penghapusan dukungan keuangan, dengan hasil bahwa 9 dari dua puluh tujuh prefektur dengan sekolah Korea tidak termasuk dukungan keuangan untuk sekolah Korea dalam anggaran 2013 mereka. Ada juga gerakan yang tumbuh untuk menghentikan dukungan keuangan di tingkat kota. Banyak pemerintah daerah mengutip program nuklir DPRK dan kurangnya kemajuan dalam isu penculikan sebagai alasan untuk menghentikan dukungan keuangan, dan jelas bahwa pertimbangan politik mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menghentikan dukungan keuangan. Untuk memperluas

tanggung jawab atas insiden politik asing, di mana anak-anak tidak memiliki kekuatan, adalah pelanggaran hak atas pendidikan orang Korea Zainichi yang menghadiri sekolah-sekolah Korea.

## **F. Ucapan Kebencian Menargetkan Orang Korea di Jepang**

Kebencian terhadap suatu tindak kejahatan dan ucapan kebencian yang menargetkan etnis minoritas, terutama Korea di Jepang, telah menjadi masalah besar baru-baru ini. Pemerintah Jepang, bagaimanapun, belum mengambil langkah-langkah khusus untuk mencegah ucapan kebencian terhadap minoritas. Juga tidak melakukan studi tentang ucapan kebencian. Kebencian yang merajalela tidak dapat dikontrol melalui upaya sukarela dari masyarakat sipil.

### **1. Munculnya Xenophobia di Jepang**

Xenophobia yang menargetkan etnis minoritas, terutama orang Korea, telah menyebar dengan cepat di Jepang sejak tahun 2000-an. Pernyataan diskriminatif anonim terhadap etnis minoritas, terutama Korea, merajalela di Internet. Demonstrasi dan demonstrasi bermusuhan yang menargetkan warga Korea di Jepang telah mengumpulkan uap. Kelompok Xenophobia telah memobilisasi anggota melalui Internet dan berulang kali mengadakan demonstrasi dan demonstrasi yang diisi dengan ucapan kebencian dan intimidasi terhadap Korea. Kelompok yang disebut "Zaitokukai" adalah yang terbesar di antara mereka. Kelompok tersebut, yang dibentuk pada 2006, bertujuan untuk menghilangkan status tinggal permanen khusus bagi warga Korea jangka panjang dan warga Tionghoa yang merupakan keturunan orang-orang yang dipaksa untuk tinggal di Jepang sebelum Perang Dunia II, dan kelompok itu menentang pemberian berbagai hak kepada warga ini termasuk hak kesejahteraan. Pada 24 Juli 2014, keanggotaannya telah berkembang menjadi lebih dari

14.000 dan cabangnya berlokasi di berbagai wilayah di Jepang (Lawyers Association of Zainichi Koreans (LAZAK), 2014). Zaitokukai, bekerja sama dengan kelompok xenofobik lainnya, telah berulang kali mengadakan demonstrasi dan demonstrasi yang diisi dengan ucapan kebencian dan intimidasi terhadap komunitas Korea, termasuk sekolah Korea dan kota-kota Korea (contoh demonstrasi xenofobik dijelaskan dalam Bagian sebelumnya. Kasus - Eskalasi ujaran kebencian). Kelompok-kelompok xenofobik ini telah menyebarkan ide-ide mereka dan memperoleh dukungan melalui internet dengan mengumumkan demonstrasi dan serangan sebelumnya, mendorong partisipasi, dan merilis video yang difilmkan oleh anggota kelompok dari ucapan kebencian mereka dan serangan di berbagai situs web.

Salah satu alasan utama munculnya gerakan xenofobik baru-baru ini terhadap warga Korea di Jepang adalah kegagalan pemerintah Jepang untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah diskriminasi rasial terhadap warga Korea dan kebijakan diskriminatif yang sedang berlangsung terhadap penduduk tersebut. Sebagai contoh, dalam Pengamatan Penutup 2001, Komite CERD menyatakan keprihatinan tentang diskriminasi yang mempengaruhi minoritas Korea dan membuat rekomendasi seperti menghukum diskriminasi rasial dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pejabat publik tingkat tinggi membuat pernyataan diskriminatif. Pemerintah Jepang, bagaimanapun, tidak mengambil langkah-langkah ini. Kebijakan diskriminatif dan pernyataan diskriminatif oleh pejabat publik tingkat tinggi terus berlanjut. Pada tahun 2010, Komite CERD membuat rekomendasi serupa, termasuk penerapan undang-undang yang melarang diskriminasi ras langsung dan tidak langsung dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pejabat

publik tingkat tinggi membuat pernyataan diskriminatif. Antara tahun 2001 dan 2010, terutama setelah penculikan warga Jepang oleh Pemerintah DPRK secara resmi terungkap selama KTT Jepang-DPRK September 2002, kebencian terhadap DPRK telah dipicu oleh media. Sebagai tanggapan, pemerintah Jepang memperkuat kebijakan diskriminatifnya terhadap Korea dengan berbagai cara, seperti mengecualikan sekolah Korea dari program pengabaian pajak pemerintah dimulai pada tahun 2010. Penguatan diskriminasi kelembagaan terhadap warga Korea oleh pemerintah ditambah dengan liputan media yang menghasut kebencian dan diskriminasi terhadap Korea telah mendorong dan memicu aktivitas gerakan xenofobik.

Kelompok Xenophobia, seperti Zaitokukai, baru-baru ini memobilisasi ratusan orang dan mengadakan pawai dan demonstrasi yang meledakkan ucapan kebencian di kota-kota Korea, terutama di Tokyo dan Osaka. Sekelompok pihak yang berwenang menemukan bahwa pada tahun 2013 setidaknya ada 360 contoh aksi atau kendaraan jalanan yang dipasang dengan pengeras suara yang meledakkan slogan penuh kebencian di seluruh Jepang. Pawai dan unjuk rasa secara teratur difilmkan oleh penyelenggara demonstrasi, dan video dirilis di web oleh anggota grup. Banyak video dapat diakses publik mulai 24 Juli 2014.

## 2. Hujatan kebencian Menargetkan Sekolah Korea di Kyoto

Pada 4 Desember 2009, anggota Zaitokukai dan kelompok xenofobik lainnya muncul di depan gerbang sekolah dasar Daiichi Kyoto Korea dan meledakkan ucapan kebencian menggunakan mikrofon. Mereka juga merusak fasilitas sekolah seperti panggung dan pembicara. Mereka berkata, misalnya: "sekolah Korea, mereka bukan sekolah sama sekali!", "Kamu adalah

institut Korea Utara untuk melatih mata-mata!", "Janji hanya dibuat antar manusia, jadi tidak ada yang bisa dibuat antara manusia dan Korea ! ", Atau“ Kembali ke Semenanjung Korea, dan makan kotoran!” Anggota-anggota kelompok xenofobik ini kembali berkumpul di sekitar sekolah dan menyanyikan ucapan kebencian pada tanggal 14 Januari dan 28 Maret 2010. Petugas polisi hadir di situs tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegah ucapan kebencian. Sekolah mengajukan tuntutan pidana, dan empat pelaku ditangkap dan diadili dengan kejahatan penyumbatan bisnis dengan kekerasan, penghinaan dan kerusakan properti. Mereka dihukum di Pengadilan Distrik Kyoto dan dijatuhi hukuman satu sampai dua tahun penjara dengan masa percobaan. Hukumannya hampir sama dengan kasus kriminal serupa yang tidak melibatkan motivasi rasial, dan motivasi diskriminatif sama sekali tidak tercermin dalam penilaian. Sementara itu, Sekolah Korea menggugat Zaitokukai dan peserta demonstrasi di depan sekolah untuk kompensasi dan perintah terhadap demonstrasi menggunakan ucapan kebencian di sekitar sekolah. Pengadilan Distrik Kyoto pada bulan Oktober 2013 mengeluarkan putusan yang memberikan kompensasi dan perintah terhadap demonstrasi dalam jarak 200 meter dari sekolah. Pengadilan menemukan bahwa demonstrasi dimotivasi oleh bias rasial dan menganggap bias tersebut sebagai faktor yang memberatkan untuk meningkatkan jumlah kompensasi berdasarkan Pasal 6 dari ICERD. Ini adalah penilaian pertama oleh pengadilan Jepang di mana tindakan ujaran kebencian diakui sebagai diskriminasi rasial. Putusan Pengadilan Distrik Kyoto juga menunjukkan bahwa tindakan-tindakan kebencian yang menargetkan sejumlah orang atau kelompok yang tidak ditentukan tidak dapat ditangani di bawah sistem hukum saat ini di Jepang, kecuali undang-undang baru diberlakukan. Kasus ini

disidangkan oleh anggota kelompok xenofobik tetapi Pengadilan Tinggi Osaka menegaskan putusan pada 8 Juli 2014. Anggota kelompok xenofobik mengajukan banding atas putusan itu, dan kasus ini masih menunggu di Mahkamah Agung pada 20 Juli 2014.

3. Ucapan Benci Mengacu pada "Pembantaian" orang Korea di Osaka Korea Town

Kelompok Xenophobic mengorganisir demonstrasi ucapan kebencian pada 24 Februari 2013 di Tsuruhashi, sebuah kota Korea yang terletak di Osaka. Sekitar 100 pendukung berkumpul dan meledakkan ucapan kebencian yang menargetkan warga Korea melalui pengeras suara. Mereka berkata, misalnya: "Orang Korea adalah kecoak dan mereka harus keluar dari Jepang!" "Orang Korea adalah pelacur yang akan melakukan apa pun demi uang!" "Penduduk Korea adalah imigran ilegal dan penjahat!" "Orang Korea sialan harus mati!" Jika (Korea) berperilaku dengan arogansi ini lebih jauh, (kami Jepang) akan melakukan Pembantaian Tsuruhashi seperti Pembantaian Nanking! ". ucapan ucapan kebencian ini sering terdengar di berbagai media maupun demonstrasi langsung. Petugas polisi hadir tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegah ucapan kebencian para peserta.

4. Ucapan Kebencian Mengacu pada "Pembasmian" dan "Chambers Gas" di Tokyo Korea Town

Kelompok Xenophobic menyelenggarakan demonstrasi ucapan kebencian pada tanggal 9 Februari 2013 di Shin-Okubo, sebuah kota Korea yang terletak di Tokyo. Sekitar 200 pendukung berkumpul dan meledakkan ucapan kebencian yang menargetkan warga Korea melalui pengeras suara. Misalnya, mereka berkata: 50 "Orang Korea adalah parasit, kecoak dan penjahat. Korea adalah musuh Jepang!" "Dapatkan belatung Korea dari Jepang!" "Korea adalah pembunuh dan pemerkosa!" "Hancurkan

Korea! ”“ Bersihkan tanah Shin-Okubo dan jadikan kamar gas! Dapatkan orang-orang Korea ke kamar gas! ”Petugas polisi hadir di situs tetapi sekali lagi memaafkan ucapan kebencian para peserta. Demonstrasi ini telah berulang kali diselenggarakan dan setidaknya sembilan dari mereka diadakan di Shin-Okubo antara Januari 2013 dan Juni 2013. Demonstrasi terbaru diselenggarakan pada 11 Mei 2014 di Shinjuku, hanya 200 meter dari kota Korea di Shin-Okubo .

Karena ucapan kebencian yang dibuat oleh organisasi xenophobia, banyak penduduk Korea di Jepang merasa terancam secara fisik. Selain itu, ucapan kebencian memiliki dampak psikologis negatif yang sangat besar terutama di kalangan siswa Korea. Imigran Korea bukan satu-satunya korban perkataan yang mendorong kebencian; Jepang Korea yang dinaturalisasi dan keturunan mereka, yang telah hidup sebagai warga negara Jepang dan memiliki kewarganegaraan Jepang, juga merasa terancam oleh ucapan kebencian yang menargetkan Korea. Menurut survei terhadap sekitar 200 generasi muda penduduk Korea dan Korea Jepang di bawah 30 tahun, yang dilakukan oleh Organisasi Pemuda Korea di Jepang (Zainichi Korea Seinen Rengo) antara Juni 2013 hingga Maret 2014, sekitar sepertiga dari mereka melaporkan perubahan gaya hidup mereka untuk menghindari ucapan kebencian seperti menghindari diskusi tentang sejarah tentang Korea atau Jepang dan menghindari ekspresi pendapat mereka di Internet. Hilangnya harga diri juga dilaporkan. Misalnya, tanggapan termasuk "Saya menjadi takut pada orang Jepang", "Saya cenderung untuk tidak diketahui orang Jepang sebagai Korea atau Korea Jepang", dan "Saya merasa negatif tentang Korea saya" . Selain itu, setelah demonstrasi ucapan kebencian menjadi umum, jumlah pelanggan yang berkunjung ke kota-kota Korea turun

tajam, dan penjualan restoran Korea dan toko-toko Korea di kota-kota Korea menurun drastis. Misalnya, jumlah pelanggan Jepang yang mengunjungi Shin-Okubo pada tahun 2014 kurang dari sepertiga dari jumlah pada tahun 2012. Lebih dari 150 toko dan restoran Korea di Shin-Okubo telah menutup atau mengubah kepemilikan selama satu setengah tahun terakhir.

#### 5. Komplikasi dan Ketidakaktifan Pemerintah Jepang

Meskipun ada ucapan kebencian yang tersebar luas dan kerusakan besar pada penduduk Korea, pemerintah Jepang belum mengambil langkah efektif untuk mencegah perkataan yang mendorong kebencian. Pemerintah Jepang seharusnya tidak mengizinkan fasilitas publik untuk digunakan oleh kelompok xenofobik yang menghasut diskriminasi rasial. Namun, pemerintah Jepang tidak hanya mengabaikan ketentuan ICERD tetapi juga memaafkan dan melindungi kegiatan kelompok xenofobia dengan menghindari penerapan undang-undang saat ini. Pada Maret 2014, mereka membalas daftar isu-isu dari Komite Hak Asasi Manusia, pemerintah Jepang telah melaporkan bahwa mereka akan melakukan berbagai kegiatan melalui Organ Hak Asasi Manusia dari Kementerian Kehakiman dan akan "mengambil masalah hak-hak warga negara asing lebih sering di berbagai sesi pelatihan." Sementara Organ Hak Asasi Manusia dari Departemen Kehakiman telah melakukan berbagai pelatihan selama beberapa dekade, itu belum cukup mencegah ucapan kebencian atau diskriminasi terhadap etnis minoritas. Sebaliknya, ucapan kebencian baru-baru ini tersebar luas di seluruh Jepang. Selain itu, pemerintah Jepang belum melakukan penelitian tentang situasi atau pada gravitasi dari ucapan kebencian sehubungan dengan jumlah peserta, organisasi yang berpartisipasi,



waktu dan tempat demonstrasi, isi ucapan kebencian, tanggapan polisi petugas, atau kerusakan dan bahaya terhadap korban kebencian. Jelas bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak efektif untuk mencegah perkataan yang mendorong kebencian.

Jepang belum mengeluarkan undang-undang untuk mengatur ucapan kebencian. Pemerintah Jepang telah menyatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk legislasi tambahan untuk mencegah pidato diskriminatif karena jika ide-ide diskriminatif ditujukan pada individu atau kelompok tertentu, adalah mungkin untuk menghukum mereka di bawah kejahatan yang ada seperti kejahatan pencemaran nama baik, penghinaan, kerusakan reputasi / gangguan bisnis, atau kejahatan intimidasi berdasarkan KUHP, dan klaim untuk kerusakan juga dimungkinkan di bawah Kode Sipil.